BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang tindak kejahatan pencucian uang melalui *cryptocurrency* pada asset *bitcoin* di Indonesia masih di atur dalam bentuk regulasi kasus pencucian uang dalam bentuk konvensional yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan *crypto* di Indonesia belum mempunyai payung hukum yang jelas. Sehingga banyak para pelaku *trader* memanfaatkannya sebagai sarana tindak pidana kejahatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Mata Uang bahwasanya *crypto* tidak diakui sebagai nilai mata uang yang sah. Akan tetapi, *crypto* di Indonesia hanya di akui sebagai asset komoditi saja yang dijelaskan di dalam peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Komoditi Aset Kripto. Regulasi yang tepat diperlukan untuk mengatasi celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejak transaksi mereka. Mencakup pendekatan *preventif*, serta penegakan hukum yang efektif. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem *cryptocurrency* di Indonesia.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang melalui

cryptocurrency pada aset *bitcoin* menimbulkan isu kebijakan tentang regulasi mengenai pengaturannya. Regulasi *crypto* yang masih kabur diperlukan upaya pemerintah agar melakukan sebuah kebijakan pembaharuan hukum pidana tersebut dengan melakukan kebijakan formulasi sebagai langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan yang dituangkan kedalam perundang-undangan. Setelah dilakukan formulasi maka kebijakan pemerintah Indonesia beserta lembaga keuangan dalam menanggulangi pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang di Indonesia melalui teknologi agar secepatnya teratasi.

B. Saran

1. Indonesia seharusnya dapat meregulasi dan menanggulangi modus baru tindak pidana pencucian uang secara non konvensional ini. Lembaga Negara dan Kementrian Perdagangan melalui Badan Kebijakan Perdagangan perlu mengevaluasi kembali secara menyeluruh terhadap pengaturan aset kripto di Indonesia dengan melakukan pengkajian lintas lembaga dan instansi terkait agar dihasilkan kajian yang komprehensif dalam kepastian hukum. Kemudian dari hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan untuk pembuatan regulasi aset kripto yang komprehensif, dan juga sebagai pertimbangan dalam pembentukan bursa berjangka kripto.
2. Urgensi pembaharuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang sangat penting berkaitan dengan pencantuman penyedia jasa keuangan seperti pedagang aset kripto ataupun *exchanger* kripto sebagai lembaga yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip *Know Your Costumer* (KYC) ataupun *Costumer Due Diligent*, yang kemudian berkewajiban untuk melaporkan berbagai transaksi mencurigakan penggunaannya sehingga ada langkah preventif yang dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan modus baru tersebut.